

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Banyuwangi, 18 Januari 2024

Kepala,

Moch. Muchlisin, A.Pi, MP
NIP. 197509161999031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	29
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	44
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	55
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	61
F. Pengungkapan Penting Lainnya	65
VI. Lampiran dan Daftar	iv

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Jl. Raya Situbondo Km.17 Tromol pos 8 Banyuwangi 68453

TELEPON 0333-510688, FAXIMILE 0333-510525

Laman :www.kkp.go.id Surel :sespri.bpppbanyuwangi@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan *AUDITED* Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan *AUDITED* Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyuwangi, 18 Januari 2024
Kepala,

Moch. Muchlisin, A.Pi, MP
NIP. 197509161999031003



DAFTAR LAMPIRAN

- A. BAR Rekonsiliasi SAKTI
- B. BAR Rekon Internal
- C. Cetakan Laporan dari SAKTI
- D. LPJ Bendahara Pengeluaran
- E. LPJ Bendahara penerimaan
- F. Memo Penyesuaian

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan *AUDITED* Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.652.695.480,00 atau mencapai 214,39 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp770.875.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp117.434.094.561,00 atau mencapai 97,42 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp120.656.972.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut :

URAIAN	31 DES 2024		% thd Angg	31 DES 2023
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	770.875.000	1.652.695.480	214,39	1.652.695.480
BELANJA	120.656.972.000	117.434.094.561	97.42	91.606.008.814

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp117.018.779.466,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp18.448.779,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp116.380.852.809,00; Properti Investasi sebesar Rp619.477.878,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp270.079.590,00 dan Rp116.748.699.876,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
ASET				
Aset Lancar	18.448.779	26.610.146	(8.161.367)	(30,67)
Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-
Aset Tetap Aset	116.380.852.809	115.997.237.922	383.614.887	0,33
Lainnya Properti	-	-	-	-
Investasi	619.477.878	-	619.477.878	-
JUMLAH ASET	117.018.779.466	116.023.848.068	994.931.398	0,86
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	270.079.590	84.759.635	185.319.955	218,64
JUMLAH KEWAJIBAN	270.079.590	84.759.635	185.319.955	218,64
EKUITAS				
Ekuitas	116.748.699.876	115.939.088.433	809.611.443	0,70
JUMLAH EKUITAS	116.748.699.876	115.939.088.433	809.611.443	0,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	117.018.779.466	116.023.848.068	994.931.398	0,86

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.603.149.866,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp118.421.806.654,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp116.818.656.788,00.

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp965.109.926,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp115.853.546.862,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL		
Jumlah Pendapatan Operasional	1.603.149.866	1.425.852.788
Jumlah Beban Operasional	(118.421.806.654)	91.957.817.587
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(116.818.656.788)	(90.531.964.799)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	16.080.210	-
Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	949.029.716	70.335.582
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	965.109.926	70.335.582
POS LUAR BIASA	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(115.853.546.862)	(90.461.629.217)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp115.939.088.433,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(115,853.546.862,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp881.759.224,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp115.781.399.081,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp116.748.699.876,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	115.939.088.433	112.256.915.093
Surplus/ Defisit LO	(115.853.546.862)	(90.461.629.217)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	881.759.224	699.711.263
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	886.281.499	695.188.988
Lain-lain	(4.522.275)	4.522.275
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	115.781.399.081	93.444.091.294
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	809.611.443	3.682.173.340
EKUITAS AKHIR	116.748.699.876	115.939.088.433

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	770.875.000	1.652.695.480	214,39	1.455.152.283
JUMLAH PENDAPATAN		770.875.000	1.652.695.480	214,39	1.455.152.283
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2.				
	B.3	88.756.210.000	88.590.041.662	99,81	65.560.739.114
Belanja Barang	B.4	30.679.747.000	27.624.711.182	90,04	24.449.131.888
Belanja Modal	B.5	1.221.015.000	1.219.341.717	99,86	1.596.137.812
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		120.656.972.000	117.434.094.561	97,33	91.606.008.814

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	5.409.239	12.613.250
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	(27.046)	(63.066)
Piutang Bukan Pajak - NETTO		5.382.193	12.550.184
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.7	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.8	-	-
Persediaan	C.9	13.066.586	14.059.962
Jumlah Aset Lancar		23.830.972	39.160.330
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	89.466.693.762	88.973.340.000
Peralatan dan Mesin	C.14	29.060.526.915	28.103.283.065
Gedung dan Bangunan	C.15	23.628.192.165	23.676.425.603
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	3.217.512.532	2.199.851.422
Aset Tetap Lainnya	C.17	364.334.195	311.342.195
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	(29.356.406.760)	(27.267.004.363)
Jumlah Aset Tetap		116.380.852.809	115.997.237.922
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.19	-	-
Aset Lain-Lain	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.21	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.22	640.029.812	-
Akumulasi Properti Investasi	C.23	(20.551.934)	-
Jumlah Properti Investasi		619.477.878	-
JUMLAH ASET		117.024.161.659	116.036.398.252
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	259.297.390	81.831.635
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	10.782.200	2.928.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		270.079.590	84.759.635
JUMLAH KEWAJIBAN		270.079.590	84.759.635
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	116.748.699.876	115.939.088.433
JUMLAH EKUITAS		116.748.699.876	115.939.088.433
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		117.018.779.466	116.023.848.068

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PEN DAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.603.149.866	1.425.852.788
JUMLAH PEN DAPATAN OPERASIONAL		1.603.149.866	1.425.852.788
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	88.794.948.362	65.552.670.864
Beban Persediaan	D.3	87.702.476	98.834.808
Beban Barang dan Jasa	D.4	19.721.723.944	16.092.031.232
Beban Pemeliharaan	D.5	2.506.261.480	5.050.478.301
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.285.234.724	3.219.872.615
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.025.948.963	1.943.889.426
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(13.295)	40.341
JUMLAH BEBAN		118.421.806.654	91.957.817.587
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(116.818.656.788)	(90.531.964.799)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	16.080.210	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		16.080.210	-
Pendapatan dari Perolehan Aset Lainnya		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		949.029.716	70.335.582
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		949.029.716	94.262.162
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	23.926.580
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAIN NYA		965.109.926	70.335.582
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		965.109.926	70.335.582
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(115.853.546.862)	(90.461.629.217)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	115.939.088.433	112.256.915.093
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(115.853.546.862)	(90.461.629.217)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3	881.759.224	699.711.263
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	886.281.499	695.188.988
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	(4.522.275)	4.522.275
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	115.781.399.081	93.444.091.294
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	809.611.443	3.682.173.340
EKUITAS AKHIR	E.5	116.748.699.876	115.939.088.433

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

A.1.1 Profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Pada tahun 2017, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi berubah nama menjadi Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 27/PERMEN-KP/2017, Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Situbondo Km.17 Banyuwangi.

A.1.2 Visi dan Misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

1) Visi

Rancangan Visi KKP, adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan Visi Presiden yang gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain.

Untuk mendukung visi KKP tersebut, BPPP Banyuwangi merancang visinya sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan"

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai BPPP Banyuwangi dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil BPPP Banyuwangi. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2) Misi

Misi BPPP Banyuwangi dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPP Banyuwangi, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;*
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;*
- c. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;*
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.*

Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3) Tujuan

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPPP Banyuwangi. Adapun tujuan strategis BPPP Banyuwangi adalah:

- a. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;*
- b. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;*
- c. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;*
- d. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.*

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis BPPP Banyuwangi yang disampaikan di atas tertuang dalam rancangan Renstra BPPP Banyuwangi 2020-2024 yang belum ditetapkan seiring dengan penetapan Renstra KKP 2020-2024.

4) Sasaran

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup KKP, BPPP Banyuwangi harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) lingkup BPPP

Banyuwangi merupakan mendukung capaian kinerja level kementerian, (level 0). Selanjutnya, hal tersebut di-cascading ke level II di bawahnya dan di-alignment antar level III.

Secara keseluruhan, BPPP Banyuwangi mengemban Sasaran Strategis sebanyak 6 (tujuh) SS seperti disajikan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

A.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. BPPP Banyuwangi dalam pelaksanaan tugas BPPP Banyuwangi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan

penyuluhan perikanan;

- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta, dan;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

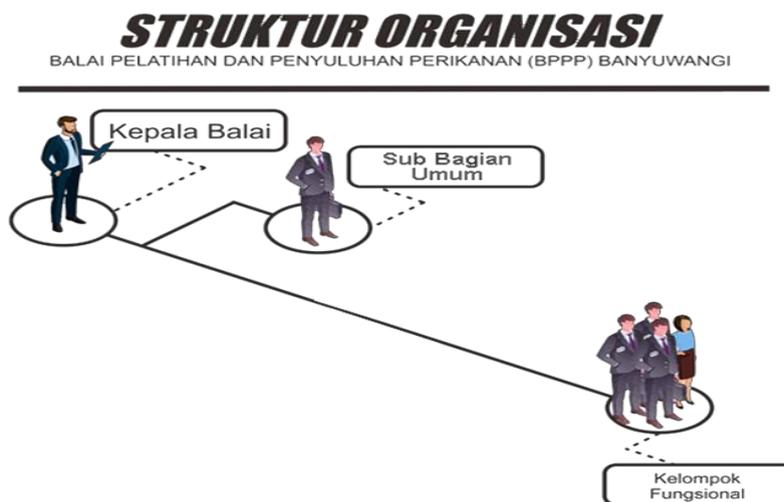
Sedangkan tugas dari setiap organisasi di BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Subbagian Umum melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER- 87/PERMEN- KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dipimpin oleh kepala balai yang merupakan jabatan struktural eselon III-a atau jabatan

administrator dengan struktur organisasi terdiri atas Sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi di BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada gambar berikut :



Per 31 Desember 2024, BPPP Banyuwangi didukung sumber daya manusia sebanyak **647** orang seperti tabel ini :

Tabel Sumber Daya Manusia BPPP Banyuwangi

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Balai	1
2.	Sub Bagian Umum	1
3.	Instruktur	17
4.	Widyaiswara	2
5.	Analisis SDM Aparatur	1
6.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	2
7.	Pranata Keuangan APBN	4
8.	Fungsional Umum	37
9.	Penyuluh Perikanan PNS	294
10.	Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	147
11.	PPPK	115
12.	Tenaga Kontrak	24
13.	Statistisi	1
14.	Arsiparis	1
	Jumlah	647

A.1.4 Rintisan *Smart Fisheries Village* (SFV) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Dalam rangka mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan produksi perikanan terutama di sektor perikanan budidaya maka pengembangan potensi desa berbasis kearifan lokal dipandang sebagai salah satu strategi pembangunan desa yang cukup efektif. Berbagai potensi yang dimiliki oleh desa sangat menarik untuk dikembangkan, salah satunya adalah potensi di bidang perikanan. Pembangunan potensi perikanan desa telah menjadi salah satu Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023-2024 dalam wujud pengembangan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal. Guna mendukung program dimaksud, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) memiliki gagasan program *SMART Fisheries Village*.

SMART Fisheries Village (SFV) merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. SFV berada di tengah-tengah program Kampung Budidaya dan Desa Inovasi/ Desa Mitra. Konsep *SMART Fisheries Village* akan juga digunakan sebagai sarana pengembangan SDM baik dari aspek pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta sebagai sarana inkubasi bisnis untuk mencetak startup di bidang perikanan. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang banyak memiliki potensi Desa mengembangkan konsep *SMART Fisheries Village*. Kabupaten di ujung timur pulau Jawa ini memiliki potensi perikanan yang sangat besar baik perikanan air tawar, payau dan laut. Kabupaten yang memiliki

81 sungai dengan panjang keseluruhan mencapai ±735 Km berfungsi untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan sebagainya. Sungai-sungai tersebut ada yang bermuara di Selat Bali yaitu sungai Lo, sungai Setail, sungai Kalibaru, sungai Sepanjang, serta sungai Kempit. Selain sungai juga terdapat 7 (tujuh) waduk dengan luas mencapai 4,0 Ha serta 2 (dua) rawa luasnya mencapai 1,50 Ha. Hutan yang masih lestari menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten dengan sumber air tawar yang dapat di kelola menjadi salah satu basis air tawar yang sangat besar. Banyuwangi juga memiliki potensi untuk pengembangan komoditas perikanan air payau dan laut terbentang di sepanjang 175,8 km garis pantai Banyuwangi.

Adapun potensi perikanan budidaya sebagai berikut :

- Tambak Udang : 1.381 Ha
- Karamba Lobster : 200 Ha
- Rumput Laut : 150 Ha
- Kolam air tenang : 170,12 Ha
- Kolam air deras : 5 buah
- Karamba sungai : 200 Unit
- Mina Padi : 25 Ha
- Waduk/rawa-rawa : 6,0 Ha

Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 10 buah. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Pulau Jawa, berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7°43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso.

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Banyuwangi sangatlah besar khususnya dibidang kelautan dan perikanan. Salah satu wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki potensi perikanan yang besar adalah Kecamatan Wongsorejo. Dalam beberapa tahun belakangan ini Kecamatan Wongsorejo mengalami proses perubahan yang nyata dan pesat terkait aktifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola potensi perikanan yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, hal ini dapat berjalan seimbang melalui terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas **(POKMASWAS)** yang memiliki peran penting dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kecamatan Wongsorejo merupakan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berada paling utara, memiliki luas 462.61 Km² dengan jumlah penduduk total 74.698 jiwa yang terdiri dari 12 desa dan 30 dusun. Secara geografis, Kecamatan Wongsorejo berada di ketinggian 1500 M di atas permukaan laut. Hal ini berdampak terhadap 53 bentuk wilayah yang rata-rata berkontur berombak hingga 100%. Sedangkan letaknya, secara geografis 30 km dari ibu kota kabupaten. Sebelah utara dibatasi Kabupaten Situbondo, sebelah barat dibatasi Kabupaten Bondowoso, sebelah timur dibatasi Selat Bali dan sebelah selatan dibatasi Kecamatan Kalipuro. Potensi perikanan di Kecamatan Wongsorejo meliputi perikanan tangkap, ikan hias, karang, budidaya lobster keramba dasar dan keramba apung serta pengolahan hasil perikanan. Desa Bangsring yang berada di Kecamatan Wongsorejo merupakan daerah pesisir yang mempunyai potensi sumberdaya alam cukup besar terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Masyarakat di Desa Bangsring telah banyak mengalami perubahan terutama dalam kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan potensi

perikanan yang ada dengan menerapkan informasi dan teknologi baru dalam mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola potensi perikanan berbasis edukasi wisata bahari. Secara topografi Desa Bangsring merupakan dataran subur dengan perbukitan dan seluruh bagian utara merupakan daerah pesisir pantai. Mata pencaharian masyarakatnya Sebagian besar adalah nelayan, petani dan pembudidaya ikan. Sektor ekonomi di daerah ini banyak di hasilkan oleh bidang perikanan budidaya, pengkapan ikan, eduwisata, pengolahan ikan, dan pertanian. Sektor perikanan di Desa Bangsring telah menyerap tenaga kerja sekitar 1.500 orang. Sehingga hilirisasi ekonomi perikanan di daerah ini benar- benar di rasakan oleh masyarakat.

Dengan besarnya potensi perikanan yang dikelola semaksimal mungkin mampu menjadikan di beberapa titik lokasi di Desa Bangsring menjadi tujuan tempat wisata yang berbasis kelautan dan perikanan. Hal ini yang mendasari Desa Bangsring dipilih untuk menjadi Rintisan *Smart Fisheries Village* (SFV) yang menerapkan IPTEK.

Kegiatan ini bertujuan yaitu :

- a. Mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (desa).
- b. Membangun hubungan interaksi antara dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dunia usaha di masyarakat (desa).
- c. Mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar usaha masyarakat desa berkembang dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan daya saing usaha masyarakat (desa) melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

Output kegiatan yang ingin dicapai pada kegiatan Rintisan *Smart Fisheries Village (SFV)* sebagai berikut :

- a. Terserapnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (desa).
- b. Terciptanya interaksi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dunia usaha yang dijalankan oleh masyarakat (desa).
- c. Masyarakat aktif dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dalam rangka pengembangan usaha yang dijalankan.
- d. Masyarakat mampu berdaya saing dalam pengembangan usaha dengan memanfaatkan secara optimal ilmu dan teknologi.

Outcome kegiatan yang ingin dicapai pada kegiatan Rintisan *Smart Fisheries Village (SFV)* sebagai berikut :

- a. Perubahan perilaku dan peningkatan kompetensi masyarakat setelah menerima dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (desa).
- b. Pelaku usaha mampu mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dunia usaha yang dijalankan oleh masyarakat (desa).
- c. Peningkatan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan masyarakat d. Peningkatan produksi dan terciptanya inovasi produk unggulan pelaku usaha.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan *AUDITED* Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan *AUDITED* Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang

digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- ✓ Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ✓ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- ✓ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- ✓ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- ✓ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ✓ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ✓ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- ✓ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- ✓ Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- ✓ Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- ✓ Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- ✓ Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ✓ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- ✓ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- ✓ Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- ✓ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- ✓ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- ✓ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ✓ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ✓ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- ✓ Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✓ Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- ✓ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ✓ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- ✓ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ✓ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- ✓ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi* telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari awal sebanyak **12** kali. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan di tahun berjalan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	770.875.000	770.875.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	770.875.000	770.875.000
Belanja		
Belanja Pegawai	72.202.205.000	88.756.210.000
Belanja Barang	30.016.962.000	30.679.747.000
Belanja Modal	1.275.000.000	1.221.015.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	103.494.167.000	120.656.972.000

Revisi DIPA dilakukan 12 kali hingga akhir periode pelaporan Tahunan TA 2024, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-1 terkait Revisi Tutup Blokir *Automatic Adjustment* (AA) tanggal 29 Januari 2024,
2. Revisi DIPA ke-2 terkait Revisi Halaman III DIPA tanggal 20 Februari 2024;
3. Revisi DIPA ke-3 terkait penambahan pagu belanja pegawai tanggal 28 Maret 2024 sehingga pagu anggaran saat ini senilai Rp.118.563.172.000;
4. Revisi DIPA ke-4 terkait Revisi Halaman III DIPA tanggal 19 April 2024;
5. Revisi DIPA ke-5 terkait Revisi Halaman III DIPA

- tanggal 3 Juni 2024;
6. Revisi DIPA Ke-6 terkait Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA tanggal 15 Juli 2024;
 7. Revisi DIPA Ke-7 terkait Penyesuaian Halaman III DIPA tanggal 29 Agustus 2024;
 8. Revisi DIPA Ke-8 terkait Penyesuaian Halaman III DIPA tanggal 16 Oktober 2024;
 9. Revisi DIPA Ke-9 terkait Penambahan Pagu Anggaran Belanja Pegawai tanggal 31 Oktober 2024;
 10. Revisi DIPA Ke-10 terkait Revisi POK tanggal 5 November 2024.

Realisasi**Pendapatan**

Rp1.652.695.480,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.652.695.480,00 atau mencapai 214,39 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp770.875.000,00. Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan 13,58 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah diklat berbayar (BST, Ankapin/Atkapin), proses pelayanan penginputan dan penerbitan sertifikat yang kewenangannya dibawah Kementerian Perhubungan sudah dialihkan kembali ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan penerimaan klaim asuransi BMN (4251)	313.429.186	146.079.011	114,56
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)	1.308.880.000	1.279.920.000	2,26
Pendapatan Denda (4258)	4.684.369	358.362	1207,16
Pendapatan Lain-lain (4259)	25.701.925	28.794.910	-10,74
Jumlah	1.652.695.480	1.455.152.283	13,58

Pendapatan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi terdiri dari akun-akun pendapatan seperti pada tabel berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No.	URAIAN	2024		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112)	-	146.882.900	-
2.	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	-	250.000	-
3.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	-	16.080.210	-
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	25.000.000	73.816.076	295,26
5.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151)	55.800.000	76.400.000	136,92
6.	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421)	690.075.000	1.308.880.000	189,67
7.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	-	4.684.369	-
8.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911)	-	14.941.009	-
9.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912)	-	7.956.307	-
10.	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913)	-	2.713.888	-
11.	Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)	-	90.721	-
JUMLAH		770.875.000	1.652.695.480	214,39

Dari tabel diatas, rincian urutan peningkatan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan (425421) sebesar Rp1.308.880.000,00 yaitu berasal dari jasa pelaksanaan Diklat Basic Safety Training Fisheries Class I dan II, Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan (AKP) Ankapin Tk.II, Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan (AKP) Atkapin Tk.II, Pendapatan Uji Kompetensi Ahli Budidaya Ikan dan Udang bagi Pengelola Kesehatan Ikan;
2. Pendapatan Penjualan Hasil pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112) sebesar Rp146.882.900,00 yang berasal dari Pendapatan hasil penjualan pembesaran ikan lele pada percontohan SFV Penyuluhan1 - 16, Pendapatan Penjualan Hasil Praktek Budidaya Benih Nila;
3. Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar

- Rp76.400.000,00 yang berasal dari sewa asrama umum, sewa aula, Sewa Tambak Latih/Tambak A dan B;
4. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (425131) yaitu sewa tanah untuk penempatan toko/ cafe, sewa tanah untuk penempatan ATM, sewa asrama, dan sewa rumah dinas sebesar Rp73.816.076,00;
 5. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp16.080.210,00 yang berasal dari Hasil Lelang Noneksekusi Wajib BMN BPPP Bwi berupa 1 (satu) paket Barang Inventaris Kantor;
 6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp14.941.009,00 yang berasal dari pengembalian tunjangan umum dan fungsional PNS, pembulatan kekurangan gaji, pendapatan kelebihan pembayaran perjadi;
 7. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) sebesar Rp7.956.307,00 yang berasal dari kelebihan pembayaran berupa item pekerjaan pasangan dinding dan partisi gypsumboard pada pekerjaan interior ruang kepala balai;
 8. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar Rp4.684.369,00 yang berasal dari pekerjaan renovasi asrama dan Denda Keterlambatan Perlengkapan Pendukung Penyuluhan An.PT.Multi Kharisma Solusindo;
 9. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) sebesar Rp2.713.888,00 yang berasal dari kelebihan pembayaran berupa item alat pelindung kerja dan pekerjaan plafon pada pembangunan gedung display;
 10. Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999) sebesar Rp90.721,00 yang berasal dari kelebihan bayar untuk pengembalian TUP;

11. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119) sebesar Rp250.000,00 yang berasal dari pendapatan hasil produksi garam pelatih BPPP Banyuwangi.

Terdapat 2 macam setoran pendapatan negara bukan pajak pada realisasi pendapatan yaitu melalui pemotongan SPM dan penyetoran melalui aplikasi Simponi yaitu :

1. Pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan (425131) sebesar Rp8.025.164,00 melalui pemotongan SPM gaji berupa sewa rumah dinas pegawai PNS, sedangkan penyetoran melalui aplikasi Simponi sebesar Rp65.790.912,00 yaitu berupa sewa asrama lobster dan sewa asrama biasa dan sewa rumah dinas pegawai PNS;
2. Penerimaan Kembali Belanja TAYL (425911) sebesar Rp1.281.259,00 melalui pemotongan SPM gaji, dan penyetoran melalui aplikasi Simponi sebesar Rp13.659.750,00.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp117.434.094.561,00*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada akhir periode hingga 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp117.434.094.561,00 atau 97,42 persen dari anggaran belanja sebesar Rp120.656.972.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

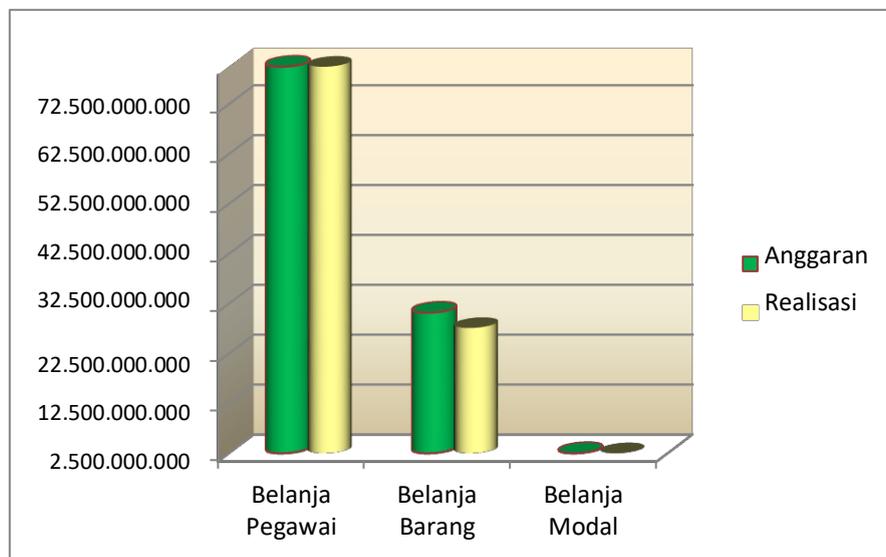
URAIAN	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	88.756.210.000	88.695.475.780	99,93
Belanja Barang	30.679.747.000	27.627.311.182	90,05
Belanja Modal	1.221.015.000	1.219.341.717	99,86
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	120.656.972.000	117.542.128.679	97,42
Pengembalian	-	(108.034.118)	-
Jumlah	120.656.972.000	117.434.094.561	97,33

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 28,19 persen, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS, perubahan status fungsional, penambahan pegawai mutasi serta adanya penambahan kegiatan pelatihan yang menunjang tuisi Balai selama TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	88.695.475.780	65.593.546.784	35,22
Belanja Barang	27.627.311.182	24.456.651.888	12,96
Belanja Modal	1.219.341.717	1.596.137.812	(23,61)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Pengembalian	(108.034.118)	(40.327.670)	167,89
Jumlah	117.434.094.561	91.606.008.814	28,19

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024



Belanja Pegawai
Rp88.590.041.662,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada akhir periode 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp88.590.041.662,00 dan Rp65.560.739.114,00. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan 35,13 persen dari 2023, hal ini disebabkan adanya realisasi awal tunjangan

kinerja untuk pegawai Balai, perubahan status pegawai dari CPNS menjadi PNS, penambahan pegawai mutasi hingga akhir periode pelaporan. Rincian realisasinya sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	36.617.650.391	29.008.449.978	26,23
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	7.677.023.536	4.570.740.396	67,96
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PNS	37.447.013.172	27.764.921.394	34,87
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPPK	6.953.788.681	4.249.435.016	63,64
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	88.695.475.780	65.593.546.784	35,22
Pengembalian Belanja Pegawai	(105.434.118)	(32.807.670)	221,37
Jumlah Belanja	88.590.041.662	65.560.739.114	35,13

Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar **Rp105.434.118,00** pada akhir periode 31 Desember 2024 yang berasal dari penyetoran pendapatan melalui pemotongan langsung dari SPM yaitu dari belanja gaji pokok PNS (511111) sebesar **Rp8.758,00**, belanja tunjangan anak PNS (511122) sebesar **Rp699.460,00**, belanja tunjangan fungsional PNS (511124) sebesar **Rp210.000,00**, belanja tunjangan beras PNS (511126) sebesar **Rp724.200,00**, belanja Uang Makan PNS (511129) sebesar **Rp100.706.000,00**, belanja tunjangan umum PNS (511151) sebesar **Rp2.405.000,00**, belanja pembulatan gaji PPPK (511619) sebesar **Rp1.500,00**, dan belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PNS (512411) sebesar **Rp679.200,00**.

Belanja Barang
Rp24.627.711.182,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp27.624.711.182,00 dan Rp24.449.131.888,00. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,99 persen dari TA 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya pagu anggaran TA 2024 untuk kegiatan pelatihan di dalam dan di luar Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dan penambahan kegiatan lain sesuai Tusi Balai.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.923.497.20	1.810.986.12	6,21
Belanja Barang Non Operasional	15.638.534.09	12.780.733.19	22,36
Belanja Jasa	2.187.074.575	1.495.719.290	46,22
Belanja Pemeliharaan	2.506.261.480	5.052.077.301	(50,39)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.285.234.724	3.219.872.615	64,14
Belanja Barang untuk diserahkan kepada	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	86.709.100	97.263.355	(10,85)
Jumlah Belanja Kotor	27.627.311.18	24.456.651.88	12,96
Pengembalian Belanja	(2.600.000)	(7.520.000)	
Jumlah Belanja	27.624.711.18	24.449.131.88	12,99

Terdapat pengembalian belanja barang sebesar **Rp2.600.000,00** yaitu pengembalian gaji PPB a.n Tetri Riztaniar, S,St.Pi yang terlambat memberikan surat pemberitahuan berhenti bekerja, namun sudah dibayarkan penggajiannya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.600.000,00.

Belanja Modal
Rp1.219.341.717,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.219.341.717,00 dan Rp1.596.137.812,00. Realisasi Belanja Modal pada akhir periode 31 Desember TA 2024 mengalami penurunan sebesar 23,61 persen dibandingkan TA 2023 disebabkan adanya pengurangan pagu anggaran belanja modal gedung

dan bangunan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920.043.850	826.800.000	11,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.297.867	769.337.812	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal BLU	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	1.219.341.717	1.596.137.812	(23,61)
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	1.219.341.717	1.596.137.812	(23,61)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah pada TA 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp920.043.850,00 dan Rp826.800.000,00. Realisasi Belanja Modal pada akhir periode 31 Desember TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,28 persen dibandingkan TA 2023 disebabkan karena bertambahnya pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	920.043.850		11,28
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	920.043.85	826.800.000	11,28

Daftar Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dijelaskan pada tabel dibawah :

1. Dari transaksi Pembelian sebesar Rp620.043.850,00 seperti tabel berikut,

JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7
132111	Peralatan dan Mesin		60	620,043,850	60	620,043,850
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	3	20,250,000	3	20,250,000
3.05.02.01.018	Meja Makan Besi	Buah	15	25,091,550	15	25,091,550
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	20	144,447,500	20	144,447,500
3.05.02.06.007	Loudspeaker	Buah	2	18,972,800	2	18,972,800
3.06.01.02.012	Video Monitor	Buah	2	254,000,000	2	254,000,000
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	7	89,256,000	7	89,256,000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	22,088,000	7	22,088,000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	45,938,000	4	45,938,000

2. Dari transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp300.000.000,00

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		1	300,000,000
3.16.01.01.003	Alat Simulator Pendidikan	Buah	1	300,000,000
TOTAL				300,000,000

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp299.297.867,00 dan Rp769.337.812,00. Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Jasa Pengawasan Pembangunan Asrama Pelatihan sebesar **Rp13.808.067,00** sesuai dengan SPK nomor : **B.1621/BPPP.BYW/PL.410/V/2024** tanggal 17 Mei 2024, pelaksana CV. UMPAK LIMO CONSULTAN;
2. Jasa Perencanaan Renovasi Asrama Pelatihan sebesar **Rp21.844.000,00** sesuai SPK nomor : **B.1100/BRSDM-BPPP.BYW/PL.410/II/2024** tanggal 28 Februari 2024, pelaksana CV. CUBICLE STUDIO;
3. Pembayaran Termyn ke-1 Rehab Asrama Pelatihan oleh **CV. Lurus Bali** dengan SPK nomor : **B.1619/BPPP.BYW/PL.410/V/2042** tanggal 17 Mei 2024 sebesar **Rp63.333.840,00**;

4. Pembayaran Termin ke-2 Rehab Asrama Pelatihan oleh **CV. Lurus Bali** dengan SPK nomor : **B.1619/BPPP.BYW/PL.410/V/2024** tanggal 17 Mei 2024 sebesar **Rp73.889.480,00**;
5. Pembayaran Termin ke-3 Rehab Asrama Pelatihan oleh **CV. Lurus Bali** (Termin Terakhir) dengan SPK nomor : **B.1619/BPPP.BYW/PL.410/V/2024** tanggal 17 Mei 2024 sebesar **Rp63.333.840,00**;
6. Pembayaran Termin ke-4 Rehab Asrama Pelatihan oleh **CV. Lurus Bali** (Termin Terakhir) dengan SPK nomor : **B.1619/BPPP.BYW/PL.410/V/2024** tanggal 17 Mei 2024 sebesar **Rp63.088.640,00**

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN)
Kolam Budidaya	-	163.084.000	-
Gedung Display	-	478.746.121	-
Gedung Display (Retensi)	-	19.807.691	
Fasilitas Penunjang Gedung Display	-	107.700.000	
Renovasi Asrama	299.297.867	-	
Jumlah Belanja	299.297.867	769.337.812	-61,10

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak ada realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan hingga akhir periode 31 Desember TA 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 hingga akhir periode 31 Desember 2024.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada realisasi Belanja Bantuan Sosial hingga akhir periode 31 Desember TA 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rinciannya sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024

Keterangan	TH 2024
Uang Tunai di Brankas Bendahara	-
Uang di Rekening Bank Bendahara	-
Saldo BP Uang Muka (Voucher)	-
Kuitansi yang belum di SPM-kan	-
Jumlah	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp5.409.239,00*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bulan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.409.239,00 dan Rp12.613.250,00. Merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Lainnya dari tagihan belanja pegawai yaitu berupa kelebihan bayar tunjangan kinerja/ khusus/ kegiatan PNS (512411) a.n A.Tsabbit Ridlo Mufti, dkk bulan Desember 2024 sebesar **Rp4.667.109,00**;
2. Piutang lainnya dari tagihan belanja pegawai yaitu berupa kelebihan bayar tunjangan kinerja/ khusus/ kegiatan PPPK (512414) a.n Ayu Rahayu, dkk bulan Desember 2024 sebesar **Rp224.130,00**;
3. Piutang Lainnya dari tagihan belanja pegawai yaitu berupa kelebihan bayar uang makan PPPK (511268) a.n Dian Satria, dkk bulan Desember 2024 sebesar **Rp518.000,00**;

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Bagian Lancar TPA
Rp0,00*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
Rp(27.046,00)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(27.046,00) dan Rp(63.066,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur yaitu sebesar 5 permil dari besaran piutang bukan pajak. Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari pengembalian kelebihan bayar tunjangan kinerja/ khusus/ kegiatan PNS dan PPPK, serta uang makan PNS bulan Desember TA. 2024 sebesar Rp27.046,00;

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0,00*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,00*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp13.066.586,00*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.066.586,00 dan Rp14.059.962,00. Persediaan adalah aset lancar dalam

bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	1.742.090	1.353.556
Bahan Baku	-	-
Suku Cadang	2.530.000	2.530.000
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	8.794.496	10.176.406
Jumlah	13.066.586	14.059.962

*Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,00*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi

atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp89.466.693.762,00

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp89.466.693.762,00 dan Rp88.973.340.000,00. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	88.973.340.000
Mutasi tambah:	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	493.353.762
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	89.466.693.762

Mutasi tambah tersebut berasal dari koreksi pencatatan nilai bertambah karena adanya pemasangan paving disekitar kolam lele (200 buah) di lingkungan kantor.

Peralatan dan

Mesin

Rp28.103.283.065,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp29.060.526.915,00 dan Rp28.103.283.065,00 . Mutasi nilainya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	28.103.283.065
Mutasi tambah:	957.243.850
Pembelian	957.243.850
Loudspeaker	18.972.800
A.C. Split	144.447.500
LCD Projector/Infocus	20.250.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	22.088.000
Lap Top	89.256.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	45.938.000
Meja Makan Besi	25.091.550
Video Monitor	254.000.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	
Peralatan Workshop Kepelautan (Engine Simulator)	300.000.000
Perolehan Lainnya	
Mesin Pembuat Pellet	37.200.000
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2024	29.060.526.915

Rincian mutasi masuk peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan 2 buah Loudspeaker sebesar Rp18.972.800,00;
2. Pengadaan AC Split sebanyak 20 buah sebesar Rp144.447.500,00;
3. Pengadaan 3 buah LCD Projector/Infocus sebesar Rp20.250.000,00;
4. Pengadaan Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 7 buah sebesar Rp22.088.000,00;
5. Pengadaan 7 buah Lap Top sebesar Rp89.256.000,00;
6. Pengadaan 4 buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp45.938.000,00;
7. Pengadaan 15 buah Meja Makan Besi sebesar Rp25.091.550,00;
8. Pengadaan Video Monitor sebanyak 2 buah sebesar Rp254.000.000,00;
9. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp300.000.000,00 yaitu pengadaan peralatan workshop kepelautan (Engine Simulator) oleh PT. AZLAM BERLIAN JAYA dengan nomor kontrak B.1539/BPPP.BYW/PL.410/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
10. Perolehan Lainnya sebesar Rp37.200.000,00 yaitu dari pembelian mesin pembuat pellet menggunakan akun 52 yang terkapitalisasi menjadi aset.

Tidak ada rincian mutasi keluar Peralatan dan Mesin hingga akhir periode 31 Desember 2024.

*Gedung dan
Bangunan
Rp23.628.192.165,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp23.628.192.165,00 dan Rp23.676.425.603,00 . Terdapat penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan hingga akhir

periode 31 Desember 2024. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	23.676.425.603
Mutasi tambah :	1.628.648.427
Saldo Awal	
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	110.997.294
Reklasifikasi Masuk	
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	221.241.127
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	295.253.754
Perolehan Lainnya	
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	199.572.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	196.517.811
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	94.169.162
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	138.690.302
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	34.615.435
Pagar Permanen	38.293.675
Pengembangan Melalui KDP	
Asrama Permanen	299.297.867
Mutasi kurang :	- 1.676.881.865
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	- 282.181.083
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	- 83.269.096
Asrama Permanen	- 154.906.993
Reklasifikasi Keluar	
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	- 295.253.754
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	- 221.241.127
Perubahan BMN Ke PI	
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	- 33.776.000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	- 606.253.812
Saldo per 31 Desember 2024	23.628.192.165

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp3.217.512.532,00*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.217.512.532,00 dan Rp2.199.851.422,00. Terdapat mutasi tambah atas jalan, irigasi, dan jaringan hingga 31 Desember 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.199.851.422
Mutasi tambah :	1.017.661.110
Saldo Awal	
Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan	79.143.085
Irigasi) Bak Penampung/Kolam/ Menara	148.415.603
Penampungan	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	100.742.022
Jalan Khusus Kompleks	
Perolehan Lainnya	97.128.000
Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan	592.232.400
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2024	3.217.512.532

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp364.334.195,00 dan Rp311.342.195,00. Terdapat mutasi tambah atas aset tetap lainnya ini hingga akhir periode Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	311.342.195
Mutasi tambah:	52.992.000
Reklasifikasi Masuk	
Monografi	52.992.000
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2024	364.334.195

Mutasi tambah pada aset tetap lainnya ini adalah reklasifikasi masuk dari pengadaan Ikan Air Tawar Budidaya dan Ikan Air Laut Budidaya menjadi monografi (120 item) sebesar Rp52.992.000,00.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,00*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00. Terdapat

mutasi tambah aset KDP sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	299.297.867
Jasa Perencanaan Renovasi Asrama Pelatihan	21.844.00
Jasa Pengawasan Renovasi Asrama Pelatihan	0
Pembangunan Renovasi Asrama Pelatihan termyn-1	13.808.067
Pembangunan Renovasi Asrama Pelatihan termyn-2	63.333.84
Pembangunan Renovasi Asrama Pelatihan termyn-3	0
Pembangunan Renovasi Asrama Pelatihan termyn-4	73.889.48
	0
Mutasi kurang:	(299.297.867)
Penyelesaian pembangunan Asrama Permanen	(299.297.867)
Saldo per 31 Desember 2024	0

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(29.356.406.760.00)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(29.356.406.760,00) dan Rp(27.267.004.363,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	29.060.526.915	-22.533.052.421	6.527.474.494
2	Gedung dan Bangunan	23.628.192.165	-5266098860	18.362.093.305
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.217.512.532	-1.543.409.479	1.674.103.053
4	Aset Tetap Lainnya	364.334.195	-13.846.000	350.488.195
5	Properti Investasi	640.029.812	-20.551.934	619.477.878
	Akumulasi Penyusutan	56.270.565.807	-29.356.406.760	26.914.159.047

*Aset Tak Berwujud
Rp0,00*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat mutasi

transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan seperti tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

*Aset Lain-Lain
Rp0,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi transaksinya adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0,00*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya di akhir periode Tahun Anggaran 2024.

*Properti Investasi
Rp640.029.812,00*

C.24 Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp640.029.812,00 dan Rp0,00. Properti Investasi didapatkan dari proses identifikasi pelaporan aset tetap Barang Milik Negara yang memenuhi

karakteristik Properti Investasi, rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gedung Diklat)	7	2021	33.776.000
2	4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Gedung Display)	3	2023	606.253.812
JUMLAH					640.029.812

*Akumulasi
Penyusutan
Properti Investasi
Rp(20.551.934,00)*

C.25 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(20.551.934,00) dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Properti Investasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,00*

C.26 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp259.297.390,00*

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp259.297.390,00 dan Rp81.831.635,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

AKUN	URAIAN	JUMLAH
Utang Kepada Pihak Ketiga	Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja) PPPK bulan Desember 2024	68.743.444
Utang Kepada Pihak Ketiga	Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja) PNS bulan Desember 2024	133.504.245
Utang Kepada Pihak Ketiga	Tagihan Langganan Listrik Bulan Desember 2024	45.638.448
Utang Kepada Pihak Ketiga	Tagihan Langganan Telepon Bulan Desember 2024	174.953
Utang Kepada Pihak Ketiga	Tagihan Langganan Internet Bulan Desember 2024	11.236.300
	TOTAL	259.297.390

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp10.782.200,00*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.782.200,00 dan Rp2.928.000,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya yaitu :

1. Sewa tanah seluas (3m x 2m) 6 meter persegi yang berdiri diatas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12.37.18.01.4.00020 yang berlokasi di dalam lingkungan kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Jalan Raya Situbondo km.17 Desa Bangsring untuk penempatan ATM milik PT. BRI (Persero) Tbk selama 3 (tiga) tahun dengan nomor surat perjanjian sewa tanah B.1662/BRSDM-BPPP.BYW/PL.210/VII/2023 terhitung mulai bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar **Rp8.784.000,00** dengan nomor bukti setor pendapatan CD2942G4VGH2N39Q tanggal 21 Juli 2023 sejumlah Rp17.568.000,00;
2. Sewa tanah seluas (3m x 2m) 6 meter persegi yang berdiri diatas tanah yang berlokasi di dalam lingkungan kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Jalan Raya Situbondo km.17 Desa Bangsring untuk penempatan ATM milik PT. BSI (Persero) Tbk

selama 5 (lima) tahun dengan nomor surat perjanjian sewa tanah B.2549/BPPP.BYW/KS.320/IX/2024, nomor 04/588-3/060 terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan Desember 2024 sebesar **Rp1.998.200,00** dengan nomor bukti setor F2C2D48VVF5ESSCD tanggal 10 September 2024 sejumlah Rp29.973.000,00.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0,00*

C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp116.748.699.876,00*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp116.748.699.876,00 dan Rp115.939.088.433,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp1.603.149.866,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.603.149.866,00 dan Rp1.425.852.788,00. Pendapatan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112)	146.882.900	416.000	35208,4
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (425119)	250.000	2.000.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	65.961.876	25.095.698	162,84
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151)	76.400.000	117.979.980	(35,24)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421)	1.308.880.000	1.279.920.000	2,26
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	4.684.369	358.362	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)	90.721	82.748	-
Jumlah	1.603.149.866	1.425.852.788	12,43

Terdapat selisih nilai pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (425131) dengan nilai pada laporan realisasi anggaran yang dijelaskan pada lampiran buku besar.

Beban Pegawai

Rp88.794.948.362,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp88.794.948.362,00 dan Rp65.552.670.864,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

(PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	24.173.898.562	18.729.272.615	29,07
Beban Gaji PPPK	5.029.153.160	2.952.652.776	70,33
Beban Tunjangan- tunjangan PNS	12.345.003.411	10.241.981.429	20,53
Beban Tunjangan- tunjangan PPPK	2.647.350.876	1.618.087.620	63,61
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PNS	37.577.234.358	27.761.241.408	35,36
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PPPK	7.022.307.995	4249435016	65,25
Jumlah	88.794.948.362	65.552.670.864	35,46

*Beban Persediaan
Rp87.702.476,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp87.702.476,00 dan Rp98.834.808,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi (593111)	75.322.566	83.407.620	-9,69
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya (593149)	12.379.910	15.427.188	-19,75
Jumlah	87.702.476	98.834.808	-11,26

*Beban Barang dan
Jasa
Rp19.721.723.944,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.721.723.944,00 dan Rp16.092.031.232,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rinciannya sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN)%
Beban Keperluan Perkantoran	1.213.888.211	1.223.634.842	(0,80)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	-7.200.000	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	155.184.000	213.344.000	(27,26)
Beban Barang Operasional Lainnya	545.166.238	340.704.035	60,01
Beban Bahan	5.935.199.140	3.314.500.251	79,07
Beban Langganan Listrik	697.584.370	636.316.903	9,63
Beban Langganan Telepon	1.412.649	1.302.055	8,5
Beban Jasa Profesi	443.600.000	121.700.000	264,50
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.258.755	12.038.700	(23,09)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.650.342.959	9.464.632.948	1,96
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-2.600.000	-320.000	712,50
Beban Sewa	316.000.000	147.800.000	113,80
Beban Jasa Lainnya	703.695.622	600.712.947	17,14
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	1.600.000	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	21.264.551	-
Beban Aset Lainnya - Ekstrakomtabel	52.992.000	0	-
Jumlah	19.721.723.944	16.092.031.232	22,56

*Beban Pemeliharaan
Rp2.506.261.480,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.506.261.480,00 dan Rp5.050.478.301,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan

2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan	1.503.917.32	3.502.034.34	(57,06)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	720.141.56	827.066.78	(12,93)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	121.776.00	482.057.61	(74,74)
Beban Pemeliharaan Jaringan	160.426.60	239.319.56	(32,97)
Jumlah	2.506.261.48	5.050.478.30	(50,38)

*Beban Perjalanan Dinas
Rp5.285.234.724,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.285.234.724,00 dan Rp3.219.872.615,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.247.419.435	1.670.576.570	34,53
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	94.200.000	30.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.943.615.289	1.519.296.045	93,75
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Jumlah	5.285.234.724	3.219.872.615	64,14

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.025.948.963,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.025.948.963,00 dan Rp1.943.889.426,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.199.623.738	1.145.486.289	4,73
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	728.117.569	730.367.905	(0,31)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.401.000	19.401.000	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	53.577.726	36.205.898	47,98
Beban Penyusutan Jaringan	12.428.334	12.428.334	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	12.800.596	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan	2.025.948.963	1.943.889.426	4,22

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp(13.295,00)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(13.295,00) dan Rp40.341,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih tersebut didapatkan dari

selisih jurnal balik beban penyisihan piutang tak tertagih di tahun 2023 sebesar Rp40.341,00 dengan jurnal beban penyisihan di tahun 2024 yang berasal dari perhitungan 5 permil dikalikan nilai total piutang bukan pajak/ piutang lainnya sebesar Rp5.409.239,00 dengan hasil Rp27.046,00.

*Beban Lain-Lain
Rp0,00*

D.11 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-Lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tidak memiliki Beban Lain-Lain.

*Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp965.109.926,00*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.941.009	28.712.162	-47,96
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	7.956.307	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset	16.080.210	0	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	926.132.400	65.550.000	-
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	-23.926.580	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	965.109.926	70.335.582	1272,15

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Lainnya sebesar **Rp16.080.210,00** yang berasal dari transaksi penjualan Pendapatan Hasil Lelang Noneksekusi Wajib BMN BPPP Banyuwangi berupa 1 (satu) paket Barang Inventaris Kantor

oleh Pejabat Lelang Thomas Sri Wijanarko,S.M : HBL tgl.17-12-2024 RL-1182; dan pendapatan perolehan aset lainnya sebesar **Rp926.132.400,00** yaitu terdiri atas :

1. Pengadaan Mesin Pembuat Pellet yang menggunakan akun 52 membentuk kapitalisasi sebesar Rp37.200.000,00;
2. Pengadaan Bangunan Gudang Tertutup Permanen yang menggunakan akun 52 membentuk kapitalisasi sebesar Rp199.572.000,00;
3. Pengadaan Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) yang menggunakan akun 52 membentuk kapitalisasi sebesar Rp97.128.000,00;
4. Pengadaan Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan yang menggunakan akun 52 membentuk kapitalisasi Rp592.232.400,00.

*Pos Luar Biasa
Rp0,00*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp115.939.088.433,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp115.939.088.433,00 dan Rp112.256.915.093,00.

Defisit LO

Rp(115.853.546.862,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp115.853.546.862,00 dan Rp(90.461.629.217,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih

Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp886.281.499,00*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp886.281.499,00 dan Rp695.188.988,00.

*Koreksi Lain-Lain
Rp(4.522.275,00)*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(4.522.275,00) dan Rp0,00. Koreksi tersebut berasal dari jurnal balik atas jurnal manual koreksi lain-lain di akhir periode anggaran 2023 (koreksi piutang lainnya).

*Transaksi Antar
Entitas
Rp115.781.399.081,00*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp115.781.399.081,00 dan Rp93.444.091.294,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(1.652.695.480,00) sedangkan DKEL sebesar Rp117.434.094.561,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer keluar sebesar Rp0,00 dan Transfer masuk sebesar Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Ekuitas Akhir

Rp116.748.699.876,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp116.748.699.876,00 dan Rp115.939.088.433,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor : SP DIPA-032.12.2.238762/2024 tanggal 24 Nopember 2023 dengan Pagu Awal sebesar Rp103.494.167.000,00, melalui **6** kali revisi DIPA yaitu :

- a. **Revisi 1** tanggal 29 Januari 2024 dengan nilai Pagu Anggaran tetap Rp103.494.167.000,00, revisi pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) terkait Revisi Tutup Blokir *Automatic Adjustment* (AA);
- b. **Revisi 2** tanggal 20 Februari 2024 dengan nilai Pagu Anggaran tetap Rp103.494.167.000,00, revisi terpusat dengan Eselon 1 KKP;
- c. **Revisi 3** tanggal 28 Maret 2024 dengan nilai Pagu Anggaran berubah dari semula Rp103.494.167.000,00 menjadi Rp118.563.172.000,00 yaitu terkait penambahan pagu belanja pegawai dengan pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) yang semula:

032.12.WA	Program Dukungan Manajemen		77.777,671,000
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		77.777,671,000

Menjadi

032.12.WA	Program Dukungan Manajemen		92.846,676,000
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		92.846,676,000

- d. **Revisi 4** tanggal 19 April 2024 dengan nilai Pagu tetap Rp118.563.172.000,00, revisi lembar III DIPA dan pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) oleh

Kanwil DJPB;

- e. **Revisi 5** tanggal 3 Juni 2024 dengan nilai Pagu tetap Rp118.563.172.000,00, revisi lembar III DIPA dan revisi pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK).
- f. **Revisi 6** tanggal 15 Juli 2024 dengan nilai pagu tetap Rp118.563.172.000,00, revisi rencana penarikan dana lembar III DIPA dan revisi pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK);
- g. **Revisi 7** tanggal 29 Agustus 2024 dengan nilai pagu berubah dari semula Rp118.563.172.000,00 menjadi Rp119.221.972.000,00, revisi penyesuaian dana lembar III DIPA;
- h. **Revisi 8** tanggal 16 Oktober 2024 dengan nilai pagu tetap Rp119.221.972.000,00, revisi penyesuaian dana lembar III DIPA;
- i. **Revisi 9** tanggal 31 Oktober 2024 dengan nilai pagu tetap Rp119.221.972.000,00, revisi pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) terkait penambahan pagu Anggaran Belanja Pegawai;
- j. **Revisi 10** tanggal 5 November 2024 dengan nilai pagu berubah dari semula Rp119.221.972.000,00 menjadi Rp120.956.972.000,00, revisi pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK);
- k. **Revisi 11** tanggal 22 November 2024 dengan nilai pagu tetap Rp120.956.972.000,00, pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK);
- l. **Revisi 12** tanggal 9 Desember 2024 dengan nilai pagu tetap Rp120.956.972.000,00, pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) terkait pengurangan pagu Anggaran untuk dialihkan ke Pusat Pelatihan sebesar Rp50.000.000 (cetak sertifikat kepelautan) tanggal 9 Desember 2024.

2. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi/ Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan/ Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional III – Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 4 kegiatan prioritas, yang tersebar di satu satuan kerja dengan pagu mencapai **Rp26.221.696.000,00** dan realisasi sebesar **Rp23.276.371.261,00 (88,77%)** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target Rincian Output	Capaian Rincian Output	%
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi	2375.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12.577.340.000	11.303.789.377	89,87	Kelompok Masyarakat	6.105	6.105	100
	2375.RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	975.000.000	973.035.850	99,80	Unit	1	1	100
	2375.RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	300.000.000	299.297.867	99,77	Unit	1	1	100
	2375.SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	12.369.356.000	10.700.248.167	86,51	Orang, Kegiatan	7.915	7.915	100
JUMLAH		26.221.696.000	23.276.371.261	88,77	-	14.022	14.022	100

3. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga :Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi :Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Satuan Kerja :Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Fungsi :EKONOMI
Sub Fungsi :PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Program :
▪ Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (032.12.DL)
▪ Program Dukungan Manajemen (032.12.WA)

Lokasi :Jawa Timur

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.12.DL 2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	26.375.296.00	23.413.369.26	88,77					
2375.QDD.00 1	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan	10.157.340.00	8.848.151.528	87,11	6100	kelompok/msyrt	6100	100	PN
2375.QDD.00 2	Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.420.000.00	2.455.637.849	101,47	5	kelompok/msyrt	5	100	PN
2375.RAL.001		975.000.00	973.035.850	99,80	1	unit	1	100	PN
2375.RBQ.00 1		300.000.00	299.297.867	99,77	1	unit	1	100	PN
2375.SCC.001	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	12.369.356.00	10.700.248.167	86,51	7915	orang	7915	100	PN
2375.DCC.00 1	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	153.600.00	136.998.000	89,19	270	orang	270	100	Non PN
032.12.WA 2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	94.281.676.00	94.128.759.418	99,84					
2378.EBA.96	Layanan Umum	259.000.00	202.323.962	78,12	1	layana	1	100	Non PN
2378.EBA.99	Layanan Perkantoran	92.431.210.00	93.773.640.399	101,45	1	layana	1	100	Non PN
2378.EBD.95	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	48.400.00	47.190.217	97,50	1	layana	1	100	Non PN
2378.EBD.95	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	67.900.00	65.538.897	96,52	2	layana	2	100	Non PN
2378.EBD.95	Layanan Manajemen Keuangan	40.166.00	40.065.943	99,75	1	layana	1	100	Non PN
	Subtotal	120.656.972.00	117.542.128.67	97,42					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*								
	Total	120.656.972.00	117.542.128.67						

